BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transportasi pada dasarnya memiliki peranan untuk memberikan kemudahan kepada penduduk di suatu wilayah untuk mencapai tempat-tempat tujuan yang diinginkan seperti menuju tempat pendidikan atau sekolah, menuju tempat bekerja, menuju tempat belanja, menuju tempat rekreasi, dan menuju ke tempat-tempat pusat pelayanan masyarakat lainnya (Bintarto, 1983). Menurut Setijowarno (2003) dari segi pelaku perjalanan, transportasi diartikan sebagai suatu perjalanan sebagai salah satu bentuk usaha melakukan suatu aktivitas dari tempat asal ke tempat tujuan. Dengan adanya alat transportasi, masyarakat akan mudah melakukan mobilitas guna memenuhi kebutuhannya, sehingga masyarakat akan semakin jeli menentukan pilihan dalam bertransportasi (Wandira dan Arief, 2022).

Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2022 menjelaskan bahwa transportasi adalah salah satu mata rantai jaringan distribusi barang dan mobilitas penumpang yang berkembang sangat dinamis serta berperan dalam mendukung, mendorong, dan menunjang segala aspek kehidupan, baik dalam pembangunan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Angkutan umum menjadi salah satu elemen dari sistem transportasi yang memegang peranan penting bagi kemajuan suatu daerah baik di kota maupun di desa. Baiknya suatu angkutan umum, haruslah memenuhi kepentingan dari Penumpang (*user*), kemudian Pengelola (*operator*) serta Pemerintah (*regulator*) (Utama dan Momon, 2021). Kebutuhan terhadap angkutan umum penumpang harus mampu memberikan kualitas pelayanan, sebagai upaya menarik minat penumpang, dalam rangka menghadapi tantangan persaingan antar jenis angkutan, terutama kendaraan pribadi (Primasworo dan Sadillah, 2021).

Kabupaten Karangasem merupakan salah satu kabupaten dari beberapa Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bali. Ibu Kota Kabupaten ini terletak di Kota Amlapura sebagai pusat kegiatan politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 839,54 km² atau 14,51% dari luas Provinsi Bali (5.780,06 km²). Jarak Kabupaten Karangasem relatif cukup jauh dari ibu kota provinsi yaitu sekitar 77,6 km dengan waktu tempuh sekitar 2 jam mengakibatkan perkembangan ekonomi dan pembangunan di wilayah ini tidak sepesat dan seramai daerah lain yang terletak di sekitar ibu kota provinsi. Kabupaten Karangasem terletak pada bagian paling timur Provinsi Bali dengan keberadaan Pelabuhan Padang Bai yang menghubungkan Pulau Bali dengan Lombok.

Sesuai Undang-Undang No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 139 ayat (3) "pemerintah daerah kabupaten/kota wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/ barang dalam wilayah Kabupaten/ kota". Terkait dengan hal tersebut maka pemerintah Kabupaten Karangasem wajib menyediakan angkutan umum yang layak untuk menunjang kegiatan masyarakat dalam beraktivitas. Diperlukan sistem transportasi yang baik serta landasan hukum yang mengatur mengenai penyelenggaraan angkutan umum tersebut. Hal ini kemudian didukung oleh Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009 pasal 145 ayat (2) yang menjelaskan bahwa "penyusunan rencana jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum disusun dalam bentuk rencana umum jaringan trayek". Kemudian pada pasal 148 huruf (c) berbunyi "Jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum ditetapkan oleh bupati/ walikota untuk jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum perkotaan dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota".

Pada tahun 2004 Pemerintah Kabupaten Karangasem meresmikan 14 trayek Angkutan Perdesaan dan 4 trayek AKDP tetapi mulai tahun 2017 trayek yang masih aktif hanya 8 trayek Angdes serta 2 trayek AKDP. Hal ini disebabkan warga Kabupaten Karangasem rata-rata telah mempunyai

kendaraan pribadi berupa sepeda motor. Dalam melakukan mobilitas, warga Kabupaten Karangasem rata-rata memakai kendaraan pribadi sehingga angkutan umum tidak bisa berperan secara maksimal.

Berdasarkan hasil analisis Tim Praktik Kerja Lapangan Kabupaten Karangasem Tahun 2023, proporsi pengguna angkutan umum dalam hal ini MPU berdasarkan survei *Home Interview* hanya 2,2%, dibandingkan dengan penggunaan kendaraan pribadi yang mencapai 94,2%. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa rendahnya penggunaan angkutan umum di Kabupaten Karangasem, hal ini terjadi karena minimnya informasi tentang angkutan perdesaan sehingga berpengaruh terhadap permintaan angkutan umum yang semakin menurun. Berdasarkan hasil survei wawancara terhadap masyarakat, penyebab minimnya penggunaan angkutan umum di Kabupaten Karangasem yaitu karena rute trayek yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Karangasem Nomor 245 Tahun 1996 tidak sesuai dengan perjalanan masyarakat, selain itu masyarakat beranggapan bahwa, kinerja pelayanan angkutan buruk, serta permasalahan pada tarif angkutan yang tidak sebanding dengan rute yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Tim PKL Kabupaten Karangasem juga menemukan kondisi kinerja jaringan saat ini armada yang beroperasi sebanyak 49 armada dari 96 armada yang diizinkan. *Load factor* angkutan umum rata-rata rendah. Nilai *load factor* rata-rata sebesar 18%. Dari hasil analisa tersebut, tidak ada trayek yang memenuhi standar *load factor* menurut PM 98 Tahun 2013 yaitu 70%. Terdapat wilayah Kabupaten Karangasem yang belum terlayani angkutan umum (angkutan perdesaan). Nisbah pelayanan angkutan perdesaan berdasarkan luas wilayah studi adalah sebesar 2,68%, dengan kondisi eksisting Kabupaten Karangasem dilayani oleh 6 trayek angkutan perdesaan.

Dengan memperhatikan permasalahan tersebut diatas, maka perlu adanya suatu peningkatan terhadap kondisi angkutan perdesaan di Kabupaten Karangasem, salah satunya dengan melakukan evaluasi terhadap rute trayek yang ditetapkan pada Surat Keputusan Bupati Karangasem

Nomor 245 Tahun 1996 Tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Perdesaan di Kabupaten Karangasem, dimana hasil evaluasinya dapat dijadikan tolak ukur dalam peningkatan operasional angkutan perdesaan di Kabupaten Karangasem, sehingga dari permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Penataan Jaringan Trayek Angkutan Umum di Kabupaten Karangasem”** disusun guna memberikan solusi dan saran dalam memperbaiki kualitas pelayanan angkutan perdesaan di Kabupaten Karangasem, sehingga mampu meningkatkan kembali minat masyarakat dalam menggunakan transportasi umum yang disediakan Pemerintah.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dan hasil observasi yang dilakukan di Kabupaten Karangasem tentang angkutan umum, permasalahan transportasi adalah sebagai berikut:

1. Terdapat wilayah Kabupaten Karangasem yang belum terlayani angkutan umum (angkutan perdesaan). Nisbah pelayanan angkutan perdesaan berdasarkan luas wilayah studi adalah sebesar 2,68%, dengan kondisi eksisting Kabupaten Karangasem dilayani oleh 6 trayek angkutan perdesaan.
2. Mobilitas pergerakan masyarakat Kabupaten Karangasem masih menggunakan kendaraan pribadi dengan proporsi pengguna angkutan umum sebesar 94,2% dan angkutan umum sebesar 2,2%.
3. *Load factor* rata-rata angkutan perdesaan di Kabupaten Karangasem yang belum memenuhi standar pelayanan pemerintah yaitu sebesar 18%.
4. Jumlah armada yang beroperasi tidak sesuai jumlah armada yang diizinkan (armada yang diizinkan 96 dan armada yang beroperasi 49).
5. Kinerja operasional pelayanan angkutan perdesaan Kabupaten Karangasem belum memenuhi standar pelayanan minimum yaitu

frekuensi rata-rata 2 (dua) kendaraan/jam, headway rata-rata 22 menit, dan kecepatan operasi rata-rata 27 km/jam.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persebaran *demand actual* dan *demand potential* angkutan perdesaan di Kabupaten Karangasem?
2. Bagaimana usulan trayek sesuai kebutuhan demand terhadap angkutan umum berdasarkan permintaan perjalanan di Kabupaten Karangasem?
3. Bagaimana rencana usulan kinerja operasional angkutan umum sesuai jaringan trayek rencana di Kabupaten Karangasem?

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud yang akan dicapai dengan penelitian ini adalah untuk melakukan penataan jaringan trayek angkutan umum di Kabupaten Karangasem sebagai bentuk usaha untuk meningkatkan pelayanan angkutan umum di Kabupaten Karangasem sehingga masyarakat di Kabupaten Karangasem dapat menggunakan angkutan umum yang efektif dan efisien.

Adapun beberapa tujuan dari penulis melaksanakan penelitian ini antara lain:

1. Mengetahui persebaran *demand actual* dan *demand potential* angkutan umum Kabupaten Karangasem.
2. Merencanakan usulan rute jaringan trayek angkutan umum rencana sesuai kebutuhan.
3. Melakukan perbandingan kinerja jaringan dan kinerja operasional angkutan umum trayek eksisting dengan trayek rencana.

1.5 Ruang Lingkup

Batasan pembahasan dalam penulisan skripsi dilakukan untuk menjaga ruang lingkup wilayah penelitian agar lebih fokus pada hal-hal sebagai berikut:

1. Wilayah studi yang diambil adalah Kabupaten Karangasem.
2. Jumlah trayek angkutan umum yang dikaji adalah 6 trayek angkutan perdesaan.
3. Melakukan penataan rute trayek angkutan umum berdasarkan rute trayek yang sudah ada sesuai SK.
4. Melakukan analisis kinerja jaringan dan kinerja operasional Angkutan Umum sesuai rencana.